

# LAPORAN

## KINERJA TRIWULAN IV



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YOGYAKARTA  
2023

# Kata Pengantar

---

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Melalui laporan kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran sepanjang Triwulan IV tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, Januari 2024  
Plt. Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik  
M. Yusuf Arriza



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja BDK Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja BDK Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## 1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 Balai Pendidikan dan Keuangan memiliki struktur organisasi baru.

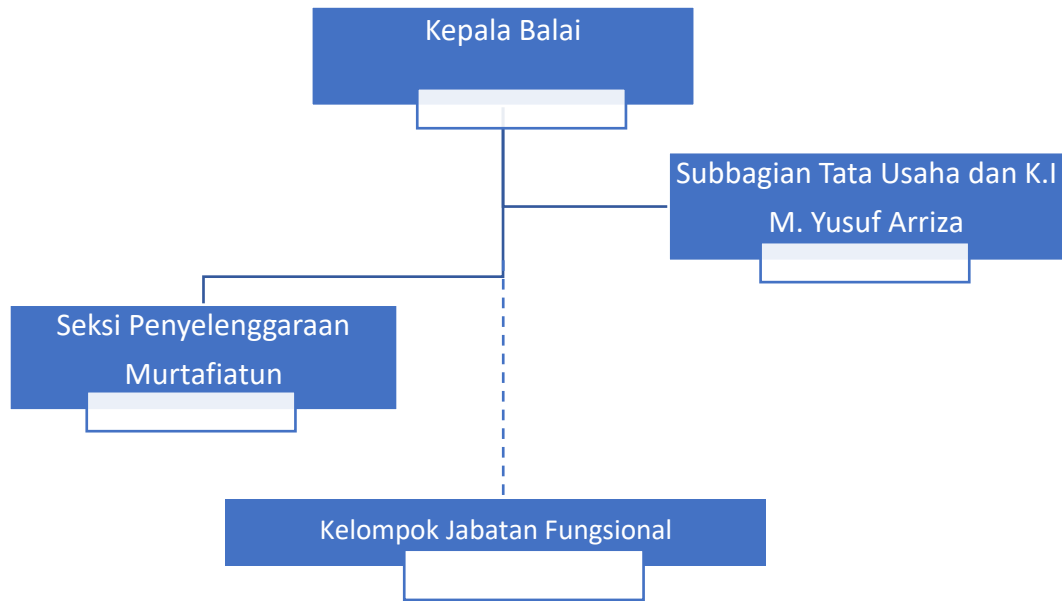
Tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta meliputi hal-hal sebagai berikut:



1. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
2. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitas implementasi sistem pembelajaran di bidang keuangan negara;
3. pemberian dukungan teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di bidang keuangan negara di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
4. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi;
5. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
6. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
7. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat Keuangan;
8. pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
9. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
10. pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
11. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan internal terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
12. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
13. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat Keuangan;
14. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki satu Jabatan Eselon III, dua Jabatan Eselon IV, serta jabatan fungsional. Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat dalam **Gambar 1.1**. Seperti terlihat dalam gambar di bawah.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi BDK Yogyakarta**

### **1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal**

Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan perpustakaan, fasilitasi dukungan teknis layanan pembelajaran, penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko, pelaksanaan penjaminan mutu layanan pembelajaran, pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan.

### **2. Seksi Penyelenggaraan**

Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara, fasilitasi implementasi sistem pembelajaran, dan fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sertifikasi, dan uji kompetensi, serta penyelenggaraan layanan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan.

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara memiliki tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan dan dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait dengan jabatan fungsional Widyaiswara.



Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Diklat Yogyakarta didukung oleh pegawai yang terdiri dari satu pejabat administrator, dua pejabat pengawas, lima pejabat fungsional (Widyaiswara), satu pejabat fungsional keuangan dan pelaksana sebanyak 17 pegawai.

**Diagram 1.1 Data Pegawai BDK Yogyakarta**



### **1.3 Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari empat bab dan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3 Sistematika Penyajian

#### **BAB II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Reencana Kerja dan Anggaran
- 2.3 Kontrak Kinerja dan Manajemen Risiko

#### **BAB IV Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2 Akuntabilitas Keuangan

#### **BAB IV Penutup**

- 4.1 Simpulan
- 4.2 Saran



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam memandangi masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan.

Perencanaan strategis akan diimplementasikan oleh organisasi beserta seluruh pegawai di dalamnya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis. Rencana strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi visi, misi, kegiatan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

##### **1. Visi Organisasi**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan visi “Menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah”.

##### **2. Misi Organisasi**

Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) Senantiasa memperbarui diri melalui proses organisasi belajar (*learning organization*) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
- 3) Berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara.

#### **2.2 Rencana Kerja dan Anggaran**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menjalankan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2023. Program Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi



Kompetensi di Bidang Keuangan Negara sedangkan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.10.620.063.000. Dari jumlah pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk enam *output* yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Intenal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 terdiri dari dua program sebagai berikut.

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.347.621.000.
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.272.442.000.

Berikut pembagian anggaran berdasarkan rincian output (RO) seperti tersaji pada **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Berdasarkan Jenis RO**

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
1	4679.CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	59.875.000
2	4679.EBA.105	Kerumahtangaan	95.795.000
3	4679.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.025.905.000
4	4679.EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	2.115.775.000
5	4679.EBB.103	Gedung/Bangunan	3.050.271.000
6	4683.DCF.102	Pembelajaran Digital	437.428.000
7	4683.DCF.103	Pembelajaran Klasikal	1.858.469.000
8	4683.DCF.106	Manajemen Pengetahuan	2.275.000
9	4683.DCF.303	ToT Implementasi PSIAP (PU)	667.000.000
10	4683.EBA.994	Layanan Perkantoran	253.270.000
11	4683.EBC.101	Pengembangan SDM	54.000.000
<b>Total</b>			<b>10.620.063.000</b>

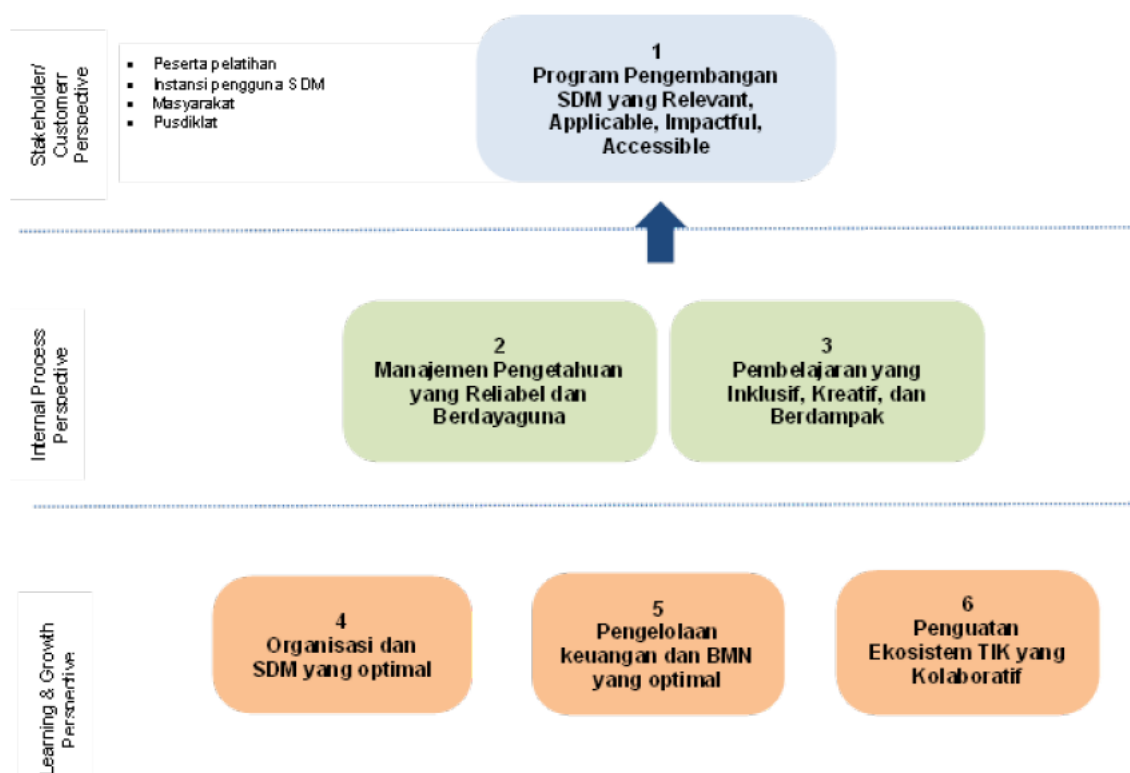
### 2.3 Kontrak Kinerja dan Manajemen Risiko

#### 1. *Strategy Map* Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta

*Strategy map* atau peta strategi adalah sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi dan strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis. Dalam meningkatkan penyelenggaraan proses bisnisnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta merumuskan peta strategi yang nantinya akan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi. Berikut adalah peta strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta.



**Diagram 2.1** Peta Strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta



**2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menyusun perjanjian kinerja yang secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter	1.	1a-CP Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	90%
		2.	1b-CP Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
		3.	1c-CP Indeks Integritas	91,1
2.	Manajemen pengetahuan yang reliable dan berdayaguna	4.	2a-CP Persentase Pemanfaatan <i>Knowledge</i> pada <i>Platform</i> KLC	100%
3.	Pembelajaran yang inklusif, kreatif dan berdampak	5.	3a-CP Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Inklusif dan Kreatif	4 (skala 5)
		6.	3b-CP Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4 (skala 5)
4.	Organisasi dan SDM yang optimal	7.	4a-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%



No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja
		8.	4b-N Persentase pelaksanaan kajian dan <i>Knowledge Capture</i>	100%
5.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	9.	5a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		10.	5b-CP Tingkat Penggunaan Aset Bersama	45%
		11.	5c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%
6.	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	12.	6a-N Tingkat pemanfaatan <i>collaboration tools</i>	100%

### 3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

BDK Yogyakarta menetapkan tiga sasaran risiko yang dimitigasi sebagai berikut.

No	Sasaran	Risiko
1	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Handal dan Berkarakter	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh unit Kepatuhan Internal (UKI) Inspektorat Jenderal dan/atau dideteksi oleh Arapat Penegak Hukum disebabkan kurangnya internalisasi nilai integritas kepada seluruh pegawai.
2	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal dikarenakan kegiatan yang alokasi anggarannya yang besar dilakukan di semester II.
3	Organisasi dan SDM yang Optimal	Pelaksanaan kajian dan <i>knowledge capture</i> tidak optimal dikarenakan kegiatan penyusunan <i>knowledge capture</i> tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga berdampak pada kurangnya optimalisasi transformasi kelembagaan.

#### a. Risiko 1

Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi berada pada level risiko sedang, besaran risiko di 15, hasil pemantauan kode etik pegawai tidak ditemukan adanya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Dampak risiko ini berada di level signifikan karena berpengaruh terhadap nama baik organisasi secara keseluruhan.

Mitigasi yang telah dilakukan adalah melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui kegiatan pembinaan UKI, *open class* atau sosialisasi.



b. Risiko 2

Risiko indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal berada pada level sedang dengan besaran risiko pada level 13, dimana pada triwulan I sampai dengan III level risiko berada pada level 14. Pada triwulan I sampai III target penyerapan sesuai IKPA tidak tercapai dan baru tercapai di triwulan IV.

Mitigasi yang telah dilakukan adalah melakukan pemantauan dan review kualitas pelaksanaan anggaran bulanan.

c. Risiko 3

Risiko pelaksanaan kajian dan *knowledge capture* tidak optimal berada pada level rendah. Besaran risiko pada tiwulan I adalah 13 turun menjadi 11 pada triwulan IV, dengan melihat realisasi produksi *knowledge capture* yang melampaui target awal tahun.

Mitigasi yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan widyaiswara terkait penyusunan *knowledge capture* tepat waktu secara triwulanan.



## BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2023 terdiri dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 6 Sasaran Strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.1**.

**Tabel 3.1 Target dan Capaian IKU Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Program Pengembangan SDM yang relevant, applicable, impactful, accessible	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	90,00%	92,22%	102,47
2		Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	116,39%	116,39
3		Indeks Integritas	91,10	93,64	102,79
4	Manajemen pengetahuan yang reliable dan berdayaguna	Persentase Pemanfaatan <i>Knowledge</i> pada <i>Platform KLC</i>	100%	103,71%	103,71
5	Pembelajaran yang Inklusif, Kreatif, dan Berdampak	Tingkat Implementasi Pembelajaran yang inklusif dan Kreatif	4,00	4,80	120,00
6		Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	4,00	4,60	115,00
7	Organisasi dan SDM yang optimal	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	100,00%	120,00
8		Persentase pelaksanaan kajian dan <i>Knowledge Capture</i>	100%	136,36%	120,00
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	101,10	100,10
10		Tingkat Penggunaan Aset Bersama	45%	53,00%	117,78
11		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	149,19%	120,00
12	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	Tingkat pemanfaatan <i>collaboration tools</i>	100,00	120,00	120,00

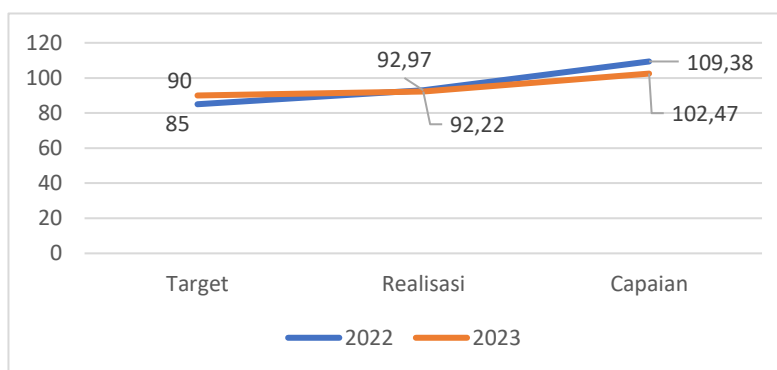
#### IKU 1. Indeks Implementasi *Learning Organization*

BDK Yogyakarta 1a-CP	SS - SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter							Polarisasi
	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	-	-	-	-	90%	90%	90%	
Realisasi					92,22%	92,22%	92,22%	
Capaian					102,47	102,47	102,47	

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kemenkeu sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu *Corporate university* berdasarkan KMK-924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.



IKU ini mulai dilaksanakan pada tahun 2022, pengukurannya dilaksanakan secara tahunan. Pada 2023 target yang ditetapkan sebesar 90% dengan nilai realisasi sebesar 92,22% dengan nilai capaian 102,47. Capaian tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 terdapat penurunan nilai capaian, capaian tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023, penurunan nilai capaian disebabkan oleh peningkatan target pada tahun 2023, serta terdapat beberapa perbedaan metode penilaian dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023 sebagaimana **Grafik.3.1** dibawah.



**Grafik 3.1** Capaian IKU Implementasi *Learning Organization*

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam implementasi *learning organization* adalah, melakukan *knowledge sharing*, keikutsertaan pegawai mengikuti pelatihan, pendokumentasian *knowledge capture*, pengembangan kompetensi pegawai, penyediaan ruang kerja *open space*, pelaksanaan evaluasi pascapelatihan, pembentukan CoP dan pengelolaan inovasi.

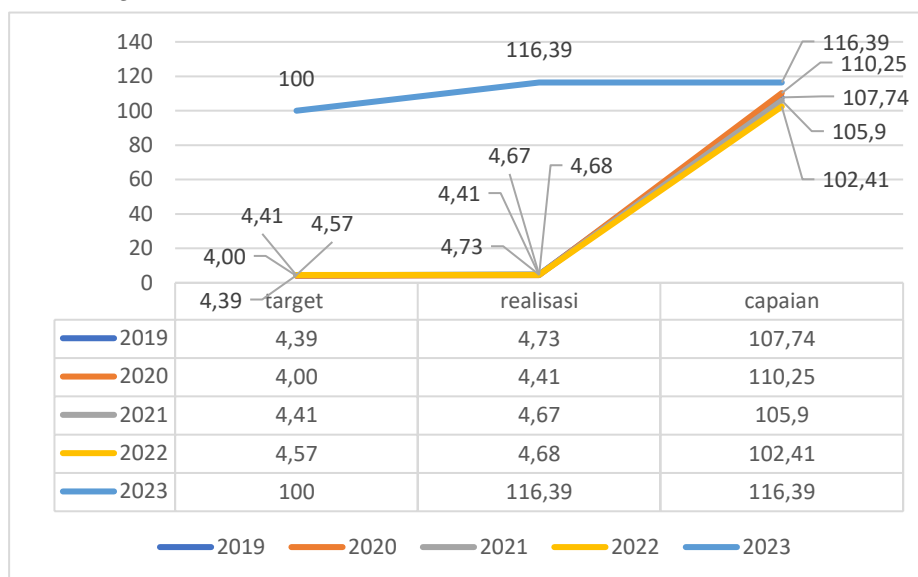
## IKU 2. Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

BDK Yogyakarta 1b-CP	SS - SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan berkarakter							Max/TLKV
	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	3%	7%	7%	11%	100%	100%	100%	
Realisasi	116,4%	16,67%	16,67%	18%	116,39%	116,39%	116,39%	
Capaian	120	120	120	120	116,39	116,39	116,39	

IKU ini mengukur sejauh mana kualitas pelayanan BPPK kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau *stakeholders* lainnya melalui survei kepuasan pengguna layanan, melalui survei kepada stakeholder dan dikoordinasikan oleh Setjen. Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerjasama dengan Tim Peneliti independen dengan *output* berupa Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan. Lingkup survei adalah pengguna layanan atau *stakeholders* dan jenis layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.



IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100% realisasi 116,39% dengan nilai capaian 116,39. Terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana **Grafik 3.2** di bawah.



**Grafik 3.2** Capain IKU Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Terdapat perbedaan pada satuan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 satuan pengukuran adalah indeks, namun tahun 2023 satuan pengukuran menjadi persentase, sehingga terdapat perbedaan pada nilai target dan realisasi sebagaimana pada **Grafik 3.2**. *Extra Effort* yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan IKU ini adalah meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh stakeholder.

### IKU 3. Indeks Integritas

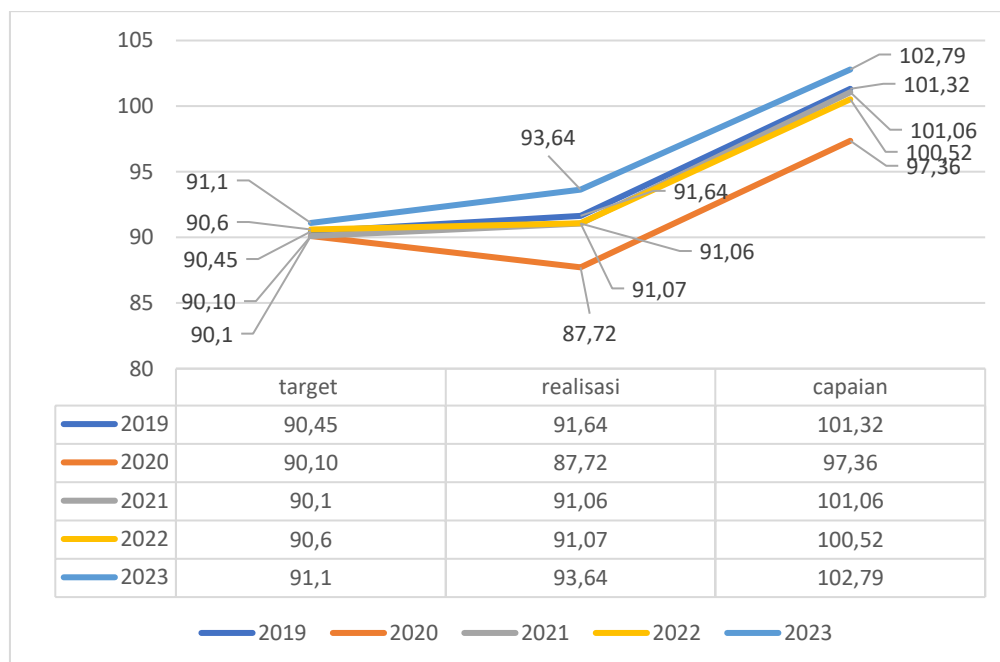
BDK Yogyakarta 1c-CP	SS – Organisasi dan SDM yang Optimal							Max/TLKV
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target					91,10	91,10	91,10	
Realisasi					93,64	93,64	93,64	
Capaian					102,79	102,79	102,79	

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi. IKU ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi.



Capaian IKU Indeks Integritas perhitungan dilakukan oleh pusat, target triwulan IV sebesar 91,10 realisasi sebesar 93,64 nilai capaian sebesar 102,79.

Realisasi indeks persepsi integritas tahun 2023 menjadi realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 indeks persepsi integritas berada dalam realisasi terendah dalam dengan nilai 87,72 sebagaimana **Grafik 3.3** di bawah ini.



**Grafik 3.3** Capain IKU Indeks Persepsi Integritas

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan IKU ini adalah melaksanakan Internalisasi program penguatan budaya di lingkungan Kemenkeu, sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis core values ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

Upaya-upaya yang telah diimplementasikan ini sejalan dengan program mitigasi risiko adanya tangkap tangan, pengutan liar (pungli), tindakan korupsi, pelanggaran kode etik maupun risiko adanya fraud yang dilakukan oleh pegawai.

Rencana aksi selanjutnya dalah secara berkelanjutan melakukan internalisasi budaya antikorupsi untuk seluruh pegawai dan PPNPN agar selalu menumbuhkan kesadaran pegawai akan penguatan sikap dan perilaku budaya kemenkeu.

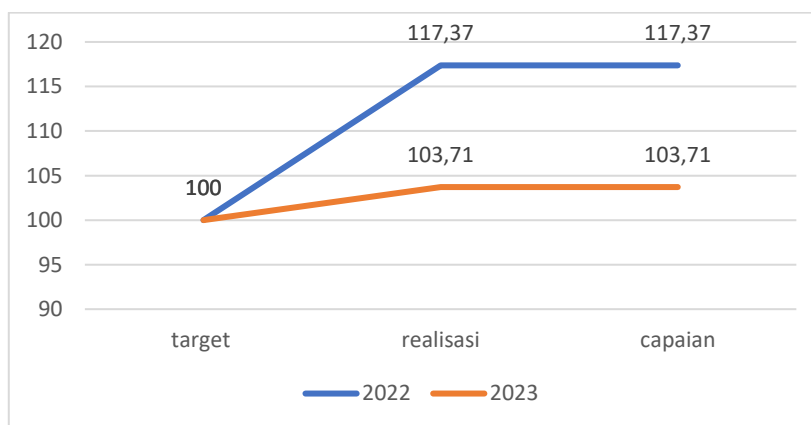


#### IKU 4. Persentase Pemanfaatan Knowledge pada Platform KLC

BDK Yogyakarta 2a-CP	SS – Manajemen Pengetahuan yang Reliabel dan Berdaya guna							Max/TLKV
	Persentase pemanfaatan knowledge pada platform KLC							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	50%	60%	60%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	103,77%	103,71%	103,71%	103,71%	103,71%	103,71%	103,71%	
Capaian	120	120	120	120	120	103,71	103,71	

IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemanfaatan *knowledge document*/materi pembelajaran di bidang Keuangan Negara pada KLC. IKU ini diukur melalui tiga aspek, yaitu efektivitas pengelolaan *Community of Practice (CoP)*, *user engagement*, dan kualitas konten.

IKU Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC dengan target sampai dengan triwulan IV sebesar 100% realisasi 103,71% nilai capaian sebesar 103,71. Terdapat penurunan nilai realisasi dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana **Grafik 3.4**. Penurunan nilai realisasi ini disebabkan karena berkurangnya *lesson learned* yang diimplemnetasikan, dimana pada tahun 2022 terdapat tiga CoP *Lesson Learned* pada tahun 2023 hanya terdapat satu CoP *Lesson Learned*. IKU ini baru terlaksana lagi pada tahun 2022 setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018.



**Grafik 3.4** Capaian IKU Pemanfaatan *Knowledge* pada *Platform* KLC

BDK Yogyakarta telah menyelesaikan satu CoP yang diupload ke KLC dan telah mendapatnya perhitungan nilai *bounce rate* sesuai hasil yang disampaikan oleh Bagian TIK Sekretariat BPPK. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah mengunggah video CoP dengan judul: Obrolan Seputar Desa Wisata pada KMS.

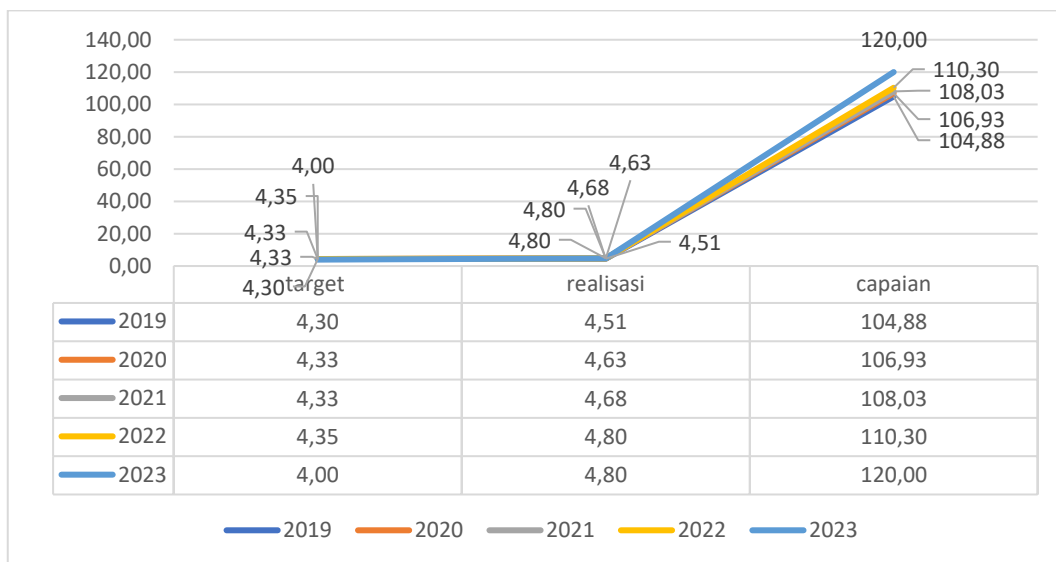
#### IKU 5. Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Inklusif dan Kreatif

BDK Yogyakarta 3a-CP	SS – Pembelajaran yang Inklusif, Kratif dan Berdampak							Max/TLKV
	Tingkat Implementasi pembelajaran yang inklusif dan kreatif							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	4	4	4	4	4	4	4	
Realisasi	4,82	4,79	4,79	4,8	4,8	4,8	4,8	
Capaian	120	119,75	119,75	120	120	120	120	



IKU ini bertujuan untuk mengukur kebaruan dalam *delivery* pembelajaran BPPK seperti PJJ, *E-learning*, *Kemenkeu Corpu Talk* dan *Kemenkeu Corpu Open Class*, pengukuran menggunakan indeks persepsi peserta sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran yang berlaku di BPPK. Penamaan IKU ini baru dilaksanakan pada tahun 2023, pada tahun sebelumnya penamaan IKU ini adalah Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran, dimana sama-sama bertujuan untuk mengukur indeks rata-rata peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Capaian IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Inklusif dan Kreatif dengan target sampai dengan triwulan IV sebesar 4 (skala 5) realisasi 4,8 nilai capaian sebesar 120. Terdapat peningkatan nilai realisasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dimana realisasi tahun 2019 adalah 4,51 sedangkan capaian tahun 2023 adalah 4,80 dengan peningkatan sebanyak 0,29 poin, sebagaimana terlihat pada **Grafik 3.5** di bawah.



**Grafik 3.5** Capain IKU Implementasi Pembelajaran Kreatif dan Inklusif

Selama tahun 2023 BDK Yogyakarta telah menyelenggarakan 57 pelatihan yang meliputi pelatihan jarak jauh dan pelatihan tatap muka serta lima *Kemenkeu Corpu Open Class*.

### IKU 6. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

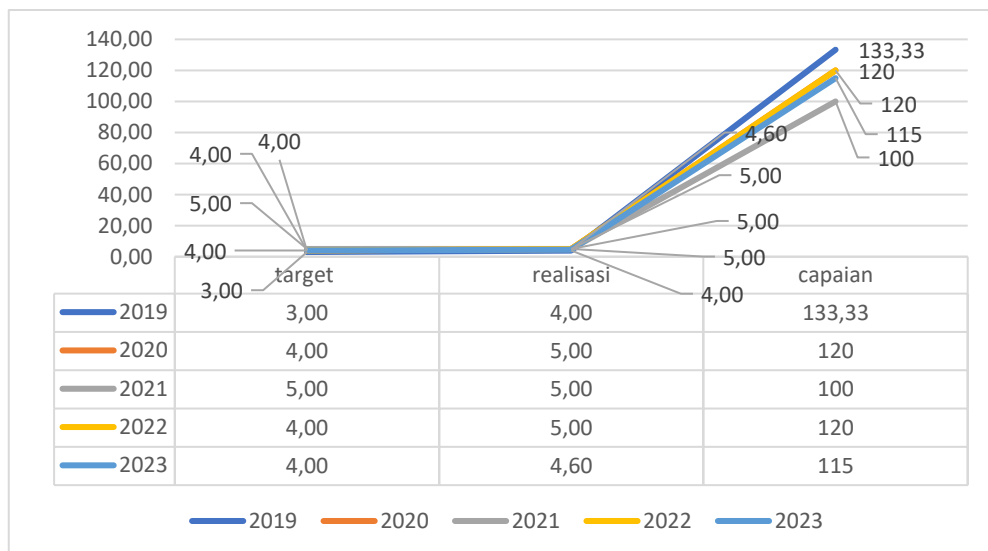
BDK Yogyakarta 3b-CP	SS – Pembelajaran yang Inklusif, Kratif dan Berdampak							Max/TLKV
	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	-	-	-	-	4	4	4	
Realisasi					4,6	4,6	4,6	
Capaian					115	115	115	

Pengukuran Kualitas Pembelajaran mengacu pada Keputusan Kepala terkait penjaminan mutu yang berlaku, terkait a. analisis kebutuhan pembelajaran; b. desain pembelajaran; c.



validasi program; d. penyelenggaraan pembelajaran; e. evaluasi pembelajaran; dan f. sarana dan prasarana pembelajaran.

Capaian IKU Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran penghitungan target secara tahunan pada triwulan VI, target sampai dengan triwulan IV adalah 4 nilai realisasi sebesar 4,6 dengan nilai capaian 115. Terdapat perbedaan target dan realisasi dari tahun ke tahun dengan target terendah pada tahun 2019 sebesar 3 poin dengan realisasi 4 nilai capaiannya menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 133,33. Untuk capaian ditahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dimana capaian tahun 2022 sebesar 5 dan tahun 2023 capaiannya menjadi 4,6 terdapat penurunan sebesar 0,4 point sebagaimana **Grafik 3.6** di bawah. Penurunan ini dipengaruhi rekomendasi hasil audit penjaminan mutu pembelajaran periode semester I tahun 2023 dan semester II tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi bagian dari komponen penilaian dengan bobot sebesar 20%.



**Grafik 3.6** Capain IKU Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

### IKU 7. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu

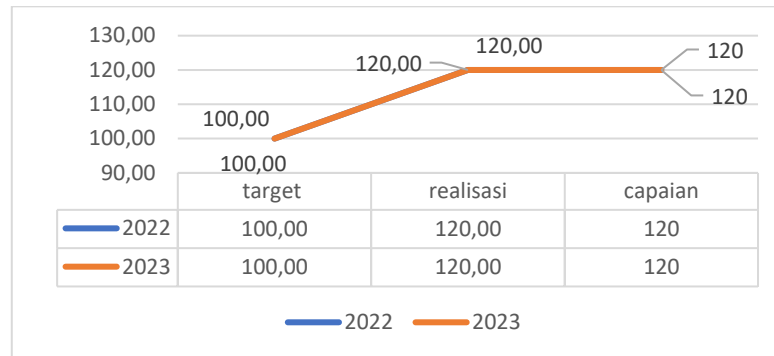
BDK Yogyakarta 4a-CP	SS – Organisasi dan SDM yang Optimal							Max/TLKV
	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	-	20%	20%	20%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	30%	30%	35%	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

IKU ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang memiliki nilai-nilai, sikap dan perilaku/kebiasaan efektif yang mendukung dan sesuai dengan pola kerja baru dan arah transformasi organisasi.

Capaian IKU Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 adalah dengan target 100% realisasi 100% nilai capaian sebesar 120. IKU ini



diimplementasikan di BDK Yogyakarta mulai tahun 2022, realisasi tahun 2022 sama dengan tahun 2023 sebagaimana **Grafik 3.7** di bawah.



**Grafik 3.7** Capain IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Isu utama dalam implementasi pelaksanaan IKU ini adalah melakukan kegiatan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan terutama budaya yang mendukung pola kerja baru melalui *roadshow/internalisasi/* kegiatan lainnya sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis *core values* ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

*Extra effort* yang telah dilaksanakan dalam implementasi IKU ini antara lain, menerapkan budaya senyum salam dan sapa, penyampaian ODOI oleh pegawai, bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsi baik internal maupun terhadap *stakeholder*, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja dan melaksanakan sosialisasi terkait nilai-nilai kementerian keuangan.

### IKU 8. Persentase pelaksanaan kajian dan Knowledge Capture

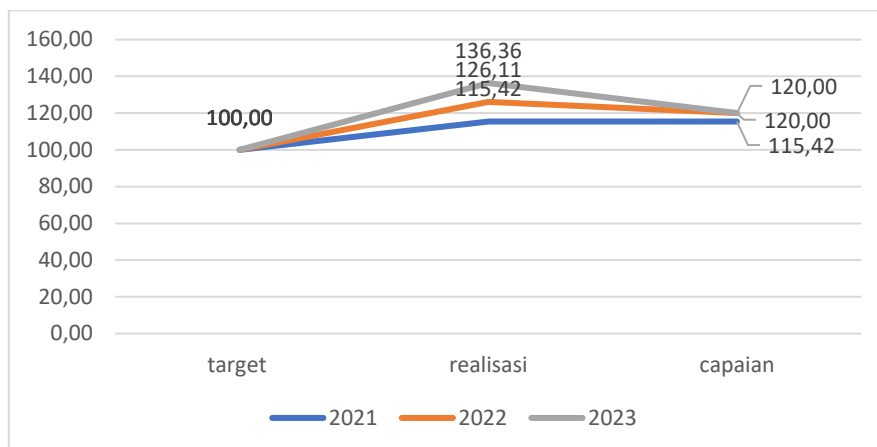
BDK Yogyakarta 4b-N	SS – Organisasi dan SDM yang Optimal							Max/TLKV
	Persentase pelaksanaan kajian dan <i>Knowledge Capture</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	10%	25%	25%	70%	100%	100%	100%	
Realisasi	136%	136%	50%	77,27%	136,36%	136,36%	136,36%	
Capaian	120	120	120	110,39	120	120	120	

IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi *learning organization* dalam bentuk penyusunan kajian dan melakukan *knowledge capture*.

Capaian IKU Persentase pelaksanaan kajian dan *Knowledge Capture* sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah dengan target 100 % nilai realisasi 136,36% dengan nilai capaian



sebesar 120. Terdapat peningkatan realisasi IKU ini selama tahun 2021 sampai 2023, realisasi tahun 2023 dengan nilai tertinggi sebesar 136,36% sebagaimana **Grafik 3.8**.



**Grafik 3.8** Capain IKU Pelaksanaan Kajian dan *Knowledge Capture*

Realisasi ini dihitung dari jumlah *knowledge capture* yang dihasilkan oleh widyaiswara, tahun 2021 *knowledge capture* yang dihasilkan sebanyak 38 dengan jumlah widyaiswara tujuh orang, tahun 2022 jumlah *knowledge capture* yang dihasilkan sebanyak 40, tahun 2023 jumlah *knowledge capture* yang dihasilkan sebanyak 23 *knowledge capture* yang disusun oleh lima orang widyaiswara dan tujuh *knowledge capture* BDK Yogyakarta yang telah diunggah di KMS. Total *output* yang dihasilkan ada 30 dari target 22 *knowledge capture*.

*Extra effort* yang telah dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan *knowledge capture* oleh widyaiswara agar dapat berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Upaya ini sejalan dengan risiko pelaksanaan kajian dan *knowledge capture* tidak optimal. Besaran risiko ini turun ke level 10 pada akhir triwulan IV, dimana pada awal triwulan I risiko berada di level 13, penurunan ini melihat dari realisasi produksi *knowledge capture* yang melampaui target awal tahun. Rencana mitigasi risiko terus dilakukan dengan melanjutkan pemantauan dan *review* progres pelaksanaan *knowledge capture*.

### IKU 9. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

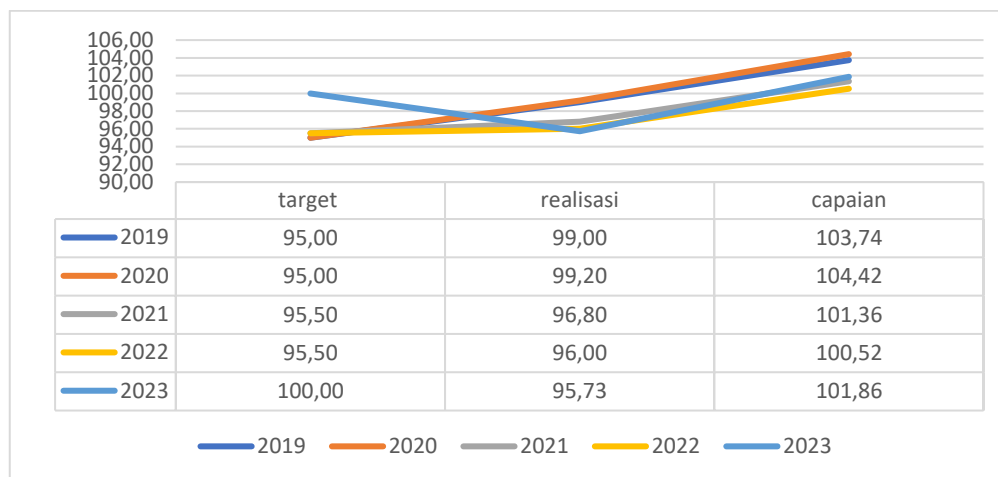
BDK Yogyakarta 5a-CP	SS – Penguatan Pengelola Keuangan yang Optimal							Max/TLKV
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	85,55	88,87	88,87	90,80	95,73	95,73	95,73	
Capaian	87,16	91,45	91,45	93,94	101,86	101,86	101,86	

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat



dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah dengan target 100 realisasi sebesar 95,73 sehingga nilai capaian sebesar 101,86. Terdapat penurunan nilai realisasi dalam kurun lima tahun terakhir sebagaimana

**Grafik 3.9.**



**Grafik 3.9** Capain IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2023 nilai indikator yang belum optimal meliputi realisasi anggaran dan deviasi halaman III DIPA. Target penyerapan tidak tercapai dari triwulan I sampai dengan III sehingga nilai indikator ini rendah. Nilai deviasi halaman III DIPA belum optimal disebabkan deviasi yang tinggi pada belanja modal bulan Maret, Juni, September, dan November. Deviasi disebabkan oleh pergeseran pembayaran antar bulan karena keterlambatan dokumen tagihan dan akselerasi belanja modal.

*Extra effort* yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target yang ditetapkan adalah semakin giat dalam penjagaan realisasi anggaran agar memenuhi target realisasi, memastikan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat BPPK.

Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam melaksanakan IKU ini, maka dimasukkan ke dalam mitigasi risiko pada level 14 dengan risiko indikator penyerapan anggaran IKPA tidak mencapai nilai optimal. Triwulan I sampai dengan III target penyerapan tidak tercapai sesuai IKPA dan baru tercapai di triwulan IV sehingga besaran level risiko turun ke angka 13 pada akhir triwulan IV.

Rencana mitigasi risiko akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melanjutkan monitoring pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sesuai target penyerapan triwulanan di IKPA berdasarkan kalender pelatihan dan memastikan ketercapaian kegiatan serta meningkatkan koordinasi antar seksi, antar fungsi, dan pihak yang terkait sehingga monitoring



pelaksanaan kegiatan dapat lebih terjaga dan realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

### **IKU 10. Tingkat Penggunaan Aset Bersama**

BDK Yogyakarta 5a-CP	SS – Penguatan Pengelola Keuangan yang Optimal							Max/TLKV
	Tingkat penggunaan aset bersama							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target					45%	45%	45%	
Realisasi					53%	53%	53%	
Capaian					117,78	117,78	117,78	

IKU ini mengukur tingkat implementasi SBSK dan penggunaan aset bersama dengan komponen: a. Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan SBSK (termasuk SSSJ); b. Persentase pengurangan jumlah satker yang belum memiliki gedung; c. Persentase penurunan biaya sewa; d. Melakukan standarisasi kebijakan, perencanaan, perbaikan dan penyediaan rumah dinas dan gedung perkantoran Kementerian Keuangan (Tinjut LOM).

Capaian IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama perhitungan target secara tahunan dengan target 45% realisasi sebesar 53% dengan nilai capaian 117,78. IKU ini baru dilaksanakan tahun 2023 sehingga tidak ada data pembandingan realisasi tahun sebelumnya.

Isu utama dalam implementasi IKU ini adalah optimalisasi penggunaan aset dan peningkatan efisiensi biaya pengelolaan aset melalui pengukuran 3 komponen, diantaranya tingkat kesesuaian SBSK, penurunan satker sewa, dan penurunan biaya sewa.

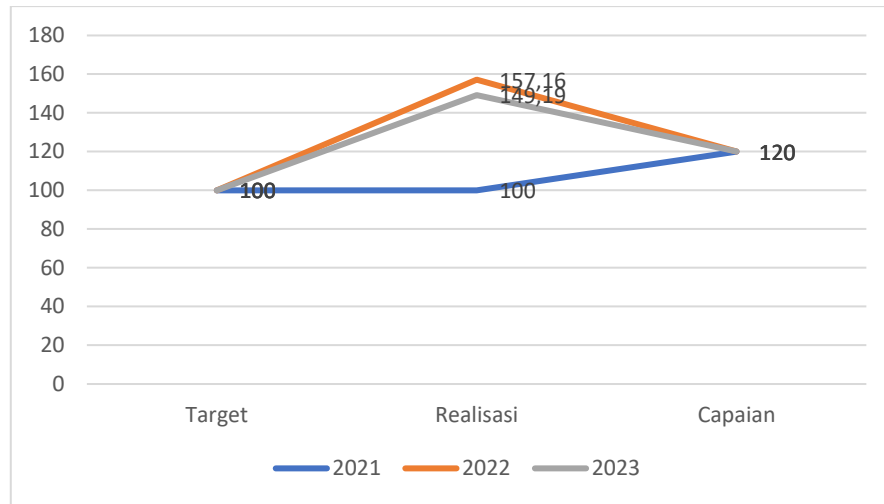
*Extra effort* yang telah dilakukan untuk implementasi IKU ini adalah mengoptimalkan penggunaan Aset dan peningkatan efisiensi biaya pengelolaan aset.

### **IKU 11. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

BDK Yogyakarta 5c-N	SS – Penguatan Pengelola Keuangan yang Optimal							Max/TLKV
	Persentase kualitas BMN dan pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target					100%	100%	100%	
Realisasi					149,19%	149,19%	149,19%	
Capaian					120	120	120	

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

Capaian IKU Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan perhitungan target secara tahunan dengan target 100% realisasi sebesar 149,19% dengan nilai capaian 120. Terdapat penurunan nilai realisasi di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,97 point, namun secara target tetap tercapai sebagaimana **Grafik 3.10**.



**Grafik 3.10** Capain IKU Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Isu utama dalam implementasi IKU ini adalah kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. Tindakan yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan ini IKU ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.

### IKU 12. Tingkat Pemanfaatan *Collaboration Tools*

BDK Yogyakarta 6a-N	SS – Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif							Max/TLKV
	Tingkat pemanfaatan <i>collaboration tools</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	s.d. Q4	Y	
Target					100	100	100	
Realisasi					120	120	120	
Capaian					120	120	120	

IKU ini merupakan komponen dari IKU Mandatory Tingkat keberhasilan migrasi data center dan pemanfaatan *collaboration tools*. Kegiatan pemanfaatan *collaboration tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa *tools* telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan *Collaboration Tools* pengukuran dilakukan oleh pusat, target realisasi sampai dengan triwulan IV adalah 100 dengan realisasi 120 dan nilai capaian 120. IKU ini baru dilaksanakan tahun 2023 sehingga tidak ada data pembandingan realisasi tahun sebelumnya.

IKU ini berkaitan dengan pemanfaatan *collaboration tools*, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa *tools* telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan



pemanfaatannya dalam pekerjaan. *Extra effort* yang dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah.

1. Monitoring pegawai untuk aktif dalam menggunakan *service mengakses Yammer*, menggunakan email, melakukan penyimpanan *file* pada *One Drive*, dan menggunakan *Sharepoints*;
2. Memonitor dan memastikan setiap pegawai berpartisipasi mengikuti Kuis *Collaboration Tools*.

Dalam kaitannya dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kegiatan-kegiatan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sangat mendukung untuk terwujudnya sasaran-sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan baik dari aspek penyelenggaraan, SDM dan sarana prasarannya, pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi diklat. Selain itu, pengembangan teknologi informasi juga selalu ditingkatkan terutama dengan penyelenggaraan pelatihan secara jarak jauh yang membutuhkan dukungan sarana teknologi dan informasi.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.10.620.063.000 yang terdiri dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.253.270.000 dan pagu anggaran non belanja pegawai sebesar Rp.10.366.793.000. Pagu anggaran dialokasikan untuk enam *output* yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal. Triwulan IV Tahun 2023 total realisasi anggaran sebesar Rp.9.770.951.385 atau sebesar 92%. Secara rinci realisasi anggaran triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.2**.

**Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Triwulan IV TA 2023**

Kode	Kegiatan/ Output	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4679.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	59.875.000	58.900.000	98,37%
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.121.700.000	1.869.466.657	88,11%
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.166.046.000	5.017.550.274	97,13%
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2.965.172.000	2.590.067.405	87,35%
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	253.270.000	191.378.000	75,56%
4683.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	54.000.000	43.580.049	80,70%
Jumlah		10.620.063.000	9.770.951.385	92,00%



### 1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Realisasi anggaran untuk *output* “Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp.58.900.000 atau 83,34% dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.59.875.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” dijelaskan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Realisasi Anggaran *Output* Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	59.875.000	58.900.000	98,37%	975.000
<b>Jumlah</b>	<b>59.875.000</b>	<b>58.900.000</b>	<b>98,37%</b>	<b>975.000</b>

### 2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *ouput* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp.1.869.466.657 (88,11%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.121.700.000. Informasi lebih rinci terkait dengan *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam **Tabel 3.4.**

**Tabel 3.4. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Kerumahtangaan	95.795.000	61.030.000	63,71%	34.765.000
Layanan Perkantoran	2.025.905.000	1.808.436.657	89,27%	217.468.343
<b>Jumlah</b>	<b>2.121.700.000</b>	<b>1.869.466.657</b>	<b>88,11%</b>	<b>252.233.343</b>

### 3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2023, realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” adalah Rp.5.017.550.274 (97,13%) dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 5.166.046.000. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” tersebut disajikan dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Sarana dan Prasarana Internal Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Peralatan Fasilitas Perkantoran	2.115.775.000	2.107.892.400	99,63%	7.882.600
Gedung/Bangunan	3.3050.271.000	2.909.657.874	95,39%	140.613.126
<b>Jumlah</b>	<b>5.166.046.000</b>	<b>5.017.550.274</b>	<b>97,13%</b>	<b>148.495.726</b>

### 4. Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2023, realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” adalah 87,35% atau sebesar Rp.2.590.076.405 dari pagu yang



tersedia sebesar Rp. 2.965.172.000. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” tersebut disajikan dalam Tabel 3.6.

**Tabel 3.6. Realisasi Anggaran *Output* Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pembelajaran Digital	437.428.000	403.335.385	92,21%	34.092.615
Pembelajaran Klasikal	1.858.469.000	1.615.473.635	86,92%	242.995.365
Manajemen Pengetahuan	2.275.000	950.000	41,76%	1.325.000
Training of Trainers Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PU)	667.000.000	570.317.385	85,50%	96.682.615
<b>Jumlah</b>	<b>2.965.172.000</b>	<b>2.590.076.405</b>	<b>87,35%</b>	<b>375.095.595</b>

## 5. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 75,56% atau sebesar Rp. 191.378.000 dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.253.270.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.7.

**Tabel 3.7. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Layanan Perkantoran	253.270.000	191.378.000	75,56%	61.892.000
<b>Jumlah</b>	<b>253.270.000</b>	<b>191.378.000</b>	<b>75,56%</b>	<b>61.892.000</b>

## 6. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Manajemen SDM Internal” sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 80,70% atau sebesar Rp.43.580.049 dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.54.000.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Manajemen SDM Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.8.

**Tabel 3.8. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Manajemen SDM Internal Triwulan IV TA 2023**

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.000.000	43.580.049	80,70%	10.419.951
<b>Jumlah</b>	<b>54.000.000</b>	<b>43.580.049</b>	<b>80,70%</b>	<b>10.419.951</b>



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2023 menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara umum capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang positif. Dari 12 IKU seluruh IKU mendapatkan capaian di atas 100. Dari segi anggaran, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta dapat merealisasikan anggaran sebesar 92,00% selama tahun 2023. Secara umum hasil capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2023 sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

### 4.2 Saran

Secara umum kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan rencana dan beberapa indikasi pengukuran kinerja menunjukkan hal yang positif, pelatihan tatap muka mulai kembali dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kinerja untuk ke depannya.

1. Meningkatkan upaya-upaya kolaborasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam rangka meningkatkan sinergi.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian disertai dengan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sesuai dengan budaya Kementerian Keuangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik berupa manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan, terutama dalam penyelenggaraan sistem pelatihan.
4. Melakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang konstruktif, evaluasi kontruktif untuk mendapatkan akar permasalahan dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta menyelesaikan masalah untuk mencapai target kinerja yang maksimal.